
**PERAN RADIO KASYFI INTI INDAH SWARA (KIIS) 106,6 FM MENCEGAH BUDAYA
"SERANGAN FAJAR" PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA PADANG SIDIMPUN
TAHUN 2019**

Oleh

Irfan Junaidi¹, Abdul Rasyid², Achiriyah³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [1irfanjunaidi@gmail.com](mailto:irfanjunaidi@gmail.com)

Article History:

Received: 23-08-2023

Revised: 12-09-2023

Accepted: 26-09-2023

Keywords:

Komunikasi Massa, Radio
KASYFI INDAH SWARA
(KIIS), Money Politic

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi radio KASYFI INDAH SWARA (KIIS) 106,6 FM dalam mencegah budaya "serangan fajar" pada pemilihan legislative di Kota Padang Sidempuan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agenda setting yang mengkaji tentang komunikasi massa beserta mediana. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi. Penelitian ini dilaksanakan di kantor media komunikasi massa "Radio KIIS 106,6 FM" (sebagai penyampai pesan) berlatar di-Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Bonan Dolok Jalan M.Nawawi Kota Padangsidempuan dengan mengikutsertakan masyarakat Kelurahan Wek II lingkungan II dan III. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pesan yang disiarkan khusus pada pemilihan legislative tahun 2019 di kota Padangsidempuan sebanyak 16 agenda setting yang khusus disiarkan kepada pemirsa setia dari Radio Kiis dan telah menciptakan kesadaran masyarakat (public awareness) dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca serta dipercaya di media massa

PENDAHULUAN

Adapun awal mula terjadinya serangan fajar sudah terbilang cukup lama, hal itu terjadi ketika Thomas Stanford Raffles memberlakukan sistem pemilihan kepala desa tidak lagi diwariskan secara turun temurun melainkan dipilih langsung oleh masyarakat. Kemudian dalam Staatblad No.490 juga memuat aturan yang disebut IGOB (*Inlandsche Gemeente Ordonnantie Biutengewsten*), yang mengatur regulasi pemerintahan desa aturan tersebut mengatur tentang aturan baru yang memuat wewenang pemerintah desa serta aturan terkait dengan susun organisasi termasuk tata tertib beserta aturan hukum lainnya. Latar belakang terjadinya Inlandsche Gemeente Ordonnantie Biutengewsten melainkan pecahnya perang Diponogoro melawan pasukan tentara belanda dan para pasukan diponogoro merekrut sebuah pasukan baru di desa-desa untuk menghalau tentara belanda.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya money politics ini sangat lah merugikan baik

untuk masyarakat ataupun kandidat yang melakukan. Bagi kandidat yang melakukan money politics ini tentu saja akan mencoreng nama baik nya sendiri. Selain,itu p)asangan calon yang terpilih juga mendapat sanksi yang tak mudah dan juga dapat didiskualifikasi yang tentunya tidak menjadi tujuan awal dari pasangan calon. Bagi masyarakat,money politics ini malah bisa melatih masyarakat untuk bertindak curang. Jika pelakunya terpilih,bisa saja dia melakukan penyalahgunaan jabatan dan terlibat kasus korupsi. Selain itu kerugian berjalannya money politic ini bagi pemerintah adalah terciptanya produk perundangan yang tidak tepat sasaran karena mereka yang menjabat tidak sesuai dengan kapasitas atau bukanlah ahli dibidangnya dan akan sangat merugikan Negara karena Negara tidak akan menjadi berkembang.

Semua pihak yang memberikan uang, materi lainnya,dan menjanjikan uang atau materi lainnya dengan tujuan untuk memengaruhi pemilih adalah subyek hukum pelaku politik uang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah di revisi beberapa kali dan terakhir di revisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Maupun Wakil Rakyat dikatakan bahwa calon kepala daerah yang melakukan politik uang (*money politics*) terstruktur, sistematis dan massif dapat didiskualifikasi pencalonannya.

Ada beberapa hal yang membuat muncul istilah”politik uang” yang pertama faktor keterbatasan ekonomi. Penyebab terjadinya politik uang tidak terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang hingga saat ini selalu memunculkan masalah-masalah baru, termasuk membuka peluang bagi terjadinya politik uang di masyarakat. Artinya bahwa kemiskinan selama ini membuat masyarakat berfikir secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politik dalam pemilu. Praktik serangan fajar akan sulit untuk diberantas dan dihentikan walau batasan ekonomi dan kemelaratan masih populer di Negara kita. Kedua faktor kurangnya pendidikan. Ber-akibat dari rendahnya kualitas pendidikan yang kita punya dikalangan rakyat. Tentunya hal ini tidak terlepas dari rendahnya faktor ekonomi yang membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sehingga hal ini mempengaruhi pola fikir dan tingkah laku mereka ketika melakukan sesuatu. Rendahnya kulitas pendidikan ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah terhadap politik dan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Ketidaktahuan masyarakat ini mempengaruhi perilaku mereka dalam menyikapi praktek politik uang yang terjadi, hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat dalam menerima sejumlah imbalan yang diberikan, kemudian sangat mudah dipengaruhi oleh partisipan tertentu untuk hanya sekedar memilih calon tersebut, hingga adanya sikap pragmatis dalam diri masyarakat membuat mereka semakin memiliki ketidakpedulian terhadap pelanggaran yang terjadi, walau seterusnya akan berdampak melemahnya kesadaran politik hingga partisipasi politik sangat rendah. Ketiga faktor lemahnya pengawasan. Praktek politik uang juga akan sulit untuk dihentikan jika kerja sama antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait masih kurang dalam melakukan pengawasan dari praktek politik uang,terutama mendekati hari pemilihan.

Strategi-strategi politik pun bermunculan,termasuk dalam hal komunikasi. Melalui media elektronik:diantaranya radio secara verbal maupun nonverbal menjadi pesan dan janji para kandidat.Semua berkomunikasi ke publik baik secara langsung maupun tidak

langsung. Komunikasi memiliki peran vital dalam keterpilihan mereka kelak. Mulai dari menguraikan program hingga sekedar tebar janji, semua disampaikan para calon tersebut, tujuannya menarik suara. Gaya ini akrab disebut komunikasi politik. Mediana pun tak meluluh secara terbuka di ruang publik, bisa juga memanfaatkan media massa atau jejaring sosial (medsos).

Penelitian ini juga berkesempatan untuk menyampaikan pesan secara moral untuk masyarakat baik itu sebagai pendengar/sebagai penerima pesan melalui media komunikasi salahsatu radio di Kota Padangsidimpuan.

Kota Padangsidimpuan memiliki 6 kecamatan kurang lebih 40 kelurahan dan desa. Pada tahun 2019 yang lalu kota Padangsidimpuan menggelar pesta demokrasi bersamaan dengan pemilihan presiden. Saat itu calon yang ada berjumlah kurang lebih delapan (8) orang per-masing masing mempunyai partai pengusungnya. Tidak sedikit daripada kandidat tersebut yang menggunakan taktik untuk duduk di bangku parlemen di Kota Padangsidimpuan ini. Hal ini yang membuat peneliti ingin menelusuri lebih dalam lagi tentang taktik apa yang sudah dilakukan bagi anggota parlemen yang sudah duduk dibangku ke-anggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut. Apakah mereka membuat taktik dengan menggunakan uang sebagai jalan mereka untuk duduk di bangku tersebut.

Pendekatan yang dilakukan mencakup tentang Teori Agenda Setting, pada era ini kajian komunikasi massa berkembang menjadi semakin luas, selain mencakup tiga jenis media (media cetak, media elektronik, dan multimedia) peran dan proses komunikasi massa, juga efek media bagi masyarakat dan budaya, sehingga semakin banyak dibuat untuk objek penelitian. Didalam sebuah kajian komunikasi berbentuk media massa, paling tidak teori-teori yang muncul dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bidang, yaitu teori-teori awal komunikasi massa, pengaruh komunikasi massa terhadap individu, pengaruh komunikasi massa terhadap masyarakat dan budaya, dan audiens pengaruhnya terhadap komunikasi massa. Salah satu teori efek komunikasi massa yaitu teori agenda setting media karena menentukan agenda dalam media memiliki peran yang penting karena publik akan cenderung memperhatikan hal-hal yang menjadi prioritas pemberitaan media massa. Agenda setting media dapat menghubungkan kemungkinan terjadinya efek mempengaruhi pendapat atau opini publik sehingga tidak hanya memperhatikan terhadap berita yang menjadi prioritas tetapi juga mempelajari seberapa besar arti penting dari cara media massa memprioritaskan topik berita tersebut (Sendjaja 2002). Teori agenda setting menganggap bahwa masyarakat akan belajar mengenai isu-isu apa dan bagaimana isu-isu tersebut disusun berdasarkan tingkat kepentingan-nya (Effendy 2001).

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti mengemukakan hal yang menjadi rumusan masalah yaitu: Bagaimana strategi Radio Kasyfi Inti Indah Swara (KIIS) 106, 6 FM dalam mencegah budaya serangan fajar di Kota Padangsidimpuan ?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini metode yang dibuat adalah meliputi metode penelitian kualitatif dan bersifat deksriptif. Bersamaan itu pengertian dari metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang dibuat guna mendekati problem dan mencari solusi.

..... Menurut Sugiyono Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik

pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dimana hasil dari penelitian ini lebih mendekati makna ketimbang generalisasi.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor media komunikasi massa "Radio KIIS 106,6 FM" (sebagai penyampai pesan) berlatar di-Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Bonan Dolok Jalan M.Nawawi Kota Padangsidimpuan dengan mengikutsertakan masyarakat Kelurahan Wek II lingkungan II dan III (pendengar atau penerima pesan atau objek studi kasus) Sedangkan waktu yang diperlukan penelitian adalah sebisa mungkin peneliti memanfaatkan waktu yang ada, supaya tujuan dari penelitian ini tercapai.

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat metode observasi atau wawancara yang dilakukan dengan mengikutsertakan 7 orang masyarakat meliputi: 2 wanita dan 5 lelaki di Lingkungan II dan III Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Sumatera Utara. Yang kedua yaitu Data Sekunder adalah data yang digunakan hanya sebagai pendukung dari data Primer misalnya dari penelitian-penelitian terdahulu, Jurnal, maupun Buku-Buku Di perpustakaan setempat.

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu alat yang dapat membantu kita dalam memperoleh data yang kita perlukan dalam penelitian kita tersebut. Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan dalam memperoleh data penelitian, seperti angket, wawancara, observasi, dokumentasi, kepustakaan, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan dan Analisis Data

Dari pengertian agenda setting peneliti mengambil sampel/isu actual yang di beritakan atau disiarkan oleh pihak radio kiis yang menyangkut isi-isi judul dari penelitian ini.

1. "Radio Harus Andil Sukseskan Pileg 2019 Melalui Program Edukatif" {Agenda berita ini disetting dan khusus disiarkan satu bulan sebelum pemilihan legislative di kota Padangsidimpuan tepatnya pada jum'at 15 maret 2019 pukul 11.40 WIB}

Padangsidimpuan, Kontestasi Pemilu yang akan dihelat april mendatang membutuhkan peran media khususnya radio untuk dapat mendongkrak pemilih melalui edukasi politik yang baik dan benar. Tagor Dumora Lubis, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Padangsidimpuan saat diwawancari melalui telewicara radio Kiis FM (Jum'at, 15/03/2019) mengungkapkan bahwa pada masa pandemi ini Pileg 2019 memiliki tantangan untuk mengedukasi masyarakat tanpa harus bertatap muka langsung, sehingga radio berperan penting terhadap kesuksesan agenda ini. "Jadi di masa pandemi, Pileg 2019 ini memang tantangannya tidak seperti Pileg di Pemilu yang lalu-lalu, karena hari ini kita menghadapi kejadian yang langka, namun proses kehidupan harus berjalan terus termasuk di antaranya adalah pesta demokrasi. Nah pesta demokrasi 2019 ini, karena di masa pandemic, tentu akan mengalami beberapa hambatan karena pembatasan-pembatasan. Karena pembatasan inilah kemudian kita berharap seluruh elemen terkait bisa mensukseskan pemilu, salah satu diantaranya adalah radio dan televisi" ujar tagor.

Radio dianggap sebagai corong yang tepat selain media lain dengan program acara yang variatif, mampu menghadirkan siaran bukan hanya kepada para pasangan calon, namun juga memberikan pengetahuan untuk meminimalisir isu-isu sentris terkait Corona.

Melalui siaran radio dan televisi, edukasi akan cukup efektif karena disiarkan melalui pancar gelombang frekuensi dan masyarakat bisa menangkap dari rumahnya masing-masing tanpa tatap muka yang berarti. Dengan demikian tidak perlu ada kegiatan mengumpulkan orang dan atau mobilisasi massa, tetapi lebih melalui pengumuman atau informasi berita untuk dapat andil dalam mensukseskan Pileg serentak 2019.

2. “Waspada Serangan Fajar Menjelang Pileg 2019” {Agenda berita ini disetting dan khusus disiarkan satu minggu sebelum pemilihan legislative di kota Padangsidimpuan tepatnya pada kamis 11 april 2019 pukul 20.50 WIB}.

PELAKSANAAN pemilihan legislatif (Pileg) serentak 17 April 2019 tinggal hitungan hari. Kini, telah masuk pada masa tenang. Masa di mana tidak ada lagi aktivitas kampanye dan kegiatan politik lainnya. Namun, berbagai upaya untuk menggagal dukungan atau suara pemilih diduga masih terjadi dengan cara melakukan serangan fajar. Sesuai jadwal KPU bahwa masa tenang Pileg 2019 berlangsung tiga hari, yakni sejak 14-16 April 2019. Setelah sebelumnya, para calon anggota dewan telah kampanye sejak 23 September 2018- 13 April 2019. KPU telah mengatur jadwal dengan pertimbangan logis, sesuai aturan yang berlaku. Tujuannya, agar pasangan calon mempunyai waktu cukup untuk istirahat sebelum pelaksanaan berlangsung. Sebab, mereka telah menghabiskan waktu 6 bulan lebih berkampanye. Kegiatan yang menguras energi, karena mengunjungi warga dari kampung ke kampung. Dalam satu hari bisa mendatangi lima tempat berbeda. Demikian pula rakyat, diberi kesempatan yang sama selama tiga hari untuk mempertimbangkan siapa yang pantas didukung.

3. “Bahaya Serangan Fajar” {Agenda berita ini disetting dan khusus disiarkan sebelum pemilihan legislative di kota Padangsidimpuan tepatnya pada senin 15 april 2019 pukul 06.00 WIB}

BADAN Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus bekerja sama mencegah berbagai bentuk politik uang yang umum dilakukan calon legislator menjelang hari pemungutan suara. Pembagian amplop berisi uang dan bahan kebutuhan pokok untuk mempengaruhi pilihan rakyat tidak hanya merupakan perilaku lancung yang melanggar aturan pemilu, tapi juga bibit korupsi yang berbahaya. Lingkaran setan inilah yang harus diputus untuk membersihkan pemilu. Jangan lagi ada politikus yang lolos ke gedung dewan tanpa basis pemilih yang jelas. Ironisnya, hampir semua politikus di negeri ini masih merasa perlu menebar uang untuk meraup dukungan. Padahal banyak studi yang menemukan bahwa politik uang sebenarnya tak terlampaui efektif buat menjaring suara. Riset Centre for Strategic and International Studies tahun lalu menemukan bahwa 52 persen responden sekarang menyatakan akan menolak politik uang. Dari riset yang sama, sebanyak 56 persen responden juga menyatakan tak bakal memilih calon yang memberikan uang atau barang. Ancaman pidana untuk pelaku politik uang juga tak main-main. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberikan sesuatu agar seseorang memilih calon tertentu adalah perbuatan pidana yang bisa diganjar tiga tahun penjara. Ke depan, pemerintah dan DPR perlu memperberat hukuman bagi pelaku. Itu bisa menimbulkan efek jera.

Elemen lain dalam pencegahan politik uang adalah pembenahan partai politik. Riset Burhanuddin Muhtadi pada 2013 menemukan kaitan antara identitas kepartaian dan politik uang. Makin tak dikenali identitas partai itu di kalangan pemilih, makin dibutuhkan serangan fajar untuk menggeser perilaku pemilih. Fenomena serupa menurun pada komunitas yang

memiliki pemahaman yang kuat soal partai yang mereka dukung. Masalahnya, kedekatan psikologis antara pemilih dan partai hanya bisa dibangun bila partai benar-benar berfungsi. Politikus harus bisa menjembatani kepentingan pemilih dengan pengambilan keputusan politik di parlemen. Jika kinerja para wakil rakyat buruk, identitas kepartaiannya juga tak bakal menguat. Walhasil, untuk menang lagi, mereka perlu menebar fulus bermiliar-miliar. Karena itulah, setelah ada yang ditangkap, belum ada jaminan praktik politik uang bakal mereda. Politikus yang tak punya identitas kepartaian dan basis pemilih yang kuat pasti berusaha melakukan "serangan fajar". Untuk pemilih, ini yang bisa dilakukan: tolak duitnya, lalu laporkan ke Badan Pengawas Pemilu. Dengan demikian, pemilihan umum jadi lebih berkualitas dan politikus durjana pun ramai-ramai masuk bui.

4."Mobil Berisi Uang Rp 1,075 Miliar" {Agenda berita ini disetting dan khusus disiarkan sebelum pemilihan legislative di kota Padangsidimpuan tepatnya pada Selasa 16 april 2019 pukul 06.00 WIB}

Aparat Polres Lamongan mengamankan satu mobil saat razia di Jalan Panglima Soedirman, Kota Lamongan. Polisi menemukan uang tunai Rp 1,075 miliar dan atribut salah satu partai politik (parpol) di dalam mobil tersebut.

Dua orang diamankan bersama sejumlah atribut salah satu partai peserta Pemilu 2019. Hal itu dibenarkan oleh Ketua Bawaslu Lamongan, Miftahul Badar.

5."Empat Orang dan Uang Ratusan Juta Rupiah di Pekanbaru" {Agenda berita ini disetting dan khusus disiarkan sebelum pemilihan legislative di kota Padangsidimpuan tepatnya pada Selasa 16 april 2019 pukul 06.00 WIB}

Bawaslu Kota Pekanbaru dan polisi melakukan operasi tangkap tangan alias OTT terhadap empat orang terduga pelaku politik uang, Selasa (16/4/2019) siang sekitar pukul 00.00 WIB.

Dari tangan pelaku, tim sentra Gakkumdu Kota Pekanbaru menyita uang Rp 506.400.000.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Pekanbaru Indra Khalid Nasution dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu Pekanbaru, Senin.

"Tim sentra Gakkumdu, dalam hal ini Bawaslu dan Polresta Pekanbaru telah mengamankan empat terduga pelaku serangan fajar (politik uang)," kata Indra kepada wartawan.

Keempat pelaku berinisial SA, NEI, DAN, dan RA ditangkap di lobi Hotel Prime Park di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.

Penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat tentang empat pelaku yang diduga akan melakukan serangan fajar pada masa tenang kampanye Pemilu 2019.

"Dari terduga pelaku, kami menemukan uang dengan total Rp 506.400.000," ujar Indra.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang tertera di Bab IV. Peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Agenda Dari Radio Kasyfi Inti Indah Swara (KIIS) 106, 6 FM memulai siaran pada pukul 05.30 s/d 01.00 WIB (setiap hari) meliputi: Pemberitaan : 10%,

Informasi Aktual : 10%, Dialog Interaktif : 5%, Musik & hiburan : 50%, Komersil : 25%. Siaran pemberitaan dibagi menjadi 3 sesi yakni pagi, siang, malam. Siaran informasi actual setiap saat adanya berita viral. Siaran dialog interaktif dibagi menjadi 2 sesi yakni siang dan malam. Siaran music dan hiburan ada setiap hari namun dijeda saat adzan.

2. Agenda setting yang disiarkan khusus pada pemilihan legislative tahun 2019 di kota Padangsidimpuan sebanyak 16 agenda setting yang khusus disiarkan kepada pemirsa setia dari Radio Kiis dan telah menciptakan kesadaran masyarakat (public awareness) dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca serta dipercaya di media massa. Juga untuk masyarakat lainnya dimana pun berada peneliti menyimpulkan bahwa semua agenda/berita tersebut memang mempunyai tujuan baik untuk masyarakat yang ikut memilih calon-nya masing-masing dan memilih dari hati nurani nya sendiri agar terciptanya pemilu yang damai dan tentram tanpa politik uang. Bisa dilihat bahwa tugas Radio Kiis telah sempurna dilakukan untuk mencegah budaya serangan fajar di kota Padangsidimpuan pada tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus. 2016. Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media
- [2] Alfian, 1993, Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia, Jakarta: Gramedia
- [3] Arifin, Anwar. Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- [4] Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Yogyakarta : Rineka Cipta, 2002.
- [5] Asshiddiqie, Jimly. 2010. Konstitusi & Konstitusioanlisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- [6] Bungin, Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [7] C, Mahfud. Pendidikan Multikultural, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- [8] Effendi, Onong Uchjana. Dimensi-Dimensi Komunikasi. Bandung: Alumni, 19.
- [9] Effendi, Onong Uchjana. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- [10] Effendi, R. dan Setiadi, Pendidikan Lingkungan, Sosial, Budaya dan Teknologi, Bandung: UPI Press, 2010.
- [11] Hamidi. Metode Penelitian dan Teori Komunikasi. Malang:UMM 2007.
- [12] Hardiman, F. B, Belajar dari Politik Multikulturalisme. Pengantar dalam Kimlicka Kewargaan Multikul- tur: Teori Liberal Mengenal Hal-Hak Minoritas. Terjemahan oleh Edlina Efmini Eddin dari Jurnal Multicultural Citizenship: (A Liberal Theory of Minority, Djakarta 1982)
- [13] Ahmad, Filsafat Pendidikan Islam, Djakarta, Jendral Pendidikan Islam Depertemen Agama, 2009.
- [14] Kusumohamidjojo, Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Proble-matik Filsafat Kebudayaan Jakarta: Grasindo, 2000.

- [15] Sidik, Firman. "Pendidikan Humanis dan Implikasinya Dalam Pembelajaran." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4.1 (2016): 88-95.
- [16] Soemarwono, Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Bandung: Djambatan, 1994.
- [17] Wahyuni, *Perilaku Beragama Studi Sosiologi Terhadap Asimilasi Agama dan Budaya Di Sulawesi Selatan*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- [18] Warsito, *Antropologi Budaya*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- [19] Afif, Ahmad Azhari. (2010). Politik Uang dalam Pemilu Kabupaten Mandailing Natal Tahun." *Jurnal Dinamika Politik*, Vol.1 No.1 Agustus 2012
- [20] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [21] Anis, Ibrahim. (2004). *Al Mu'jam al Wasith, Majma' Al Lugoh al "Arabiyyah: Maktabah Syuruq al 'Arabiyyah*.
- [22] Ashif, Mohammad Fuadi. (2010). Hubungan Tokoh Agama Dan Politik Uang Terhadap Kontribusi Perolehan Suara H. Amin, S.H Pada Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2010. *Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Diponegoro*.
- [23] Irawan, Dedi. (2015). "Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja
- [24] Rawls, John. 1971. *Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press
- [25] Cox, Eva. (1995). *A Truly Civil Society*. Sydney: ABC Book
- [26] Rogers, M Everett. (1983). *Diffusion of Innovations*. London: The Free Press
- [27] Lau, Richard R dan Redlawsk, David P. (2006). *How Voters Decide; Information Processing During Election Campaign*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [28] Heywood, Andrew. (2007). *Politics*. Third Edition. New York: Palgrave Foundation
- [29] Niemi, Richard G., dkk (eds). (2011). *Controversies in Voting Behaviour*, Fifth Edition. Washington DC: CQ Press.
- [30] Woshinsky, Oliver. H. (2008). *Explaining Politics: Cultures, Institutions, and Political Behaviour*, New York: Routledge.
- [30] **Anis, Rahma. 2010. Pencegahan budaya serangan fajar di Palu dan sekitarnya.** <https://politikuang.blogspot.com/2012/03/03-serangan-fajar-di-indonesia>
- [31] **Riko, Budi. 2016. Dampak politik uang bagi warga Indonesia.** <https://politikuangberbahaya.blogspot.com/2019/03/16-pengaruh-politikuang-kesejahteraan-rakyat-meningkat>.
- [32] Andi Akbar dengan judul "Peran Media Massa Mencegah penularan Politik Uang dalam kalangan Masyarakat Pemula Pemilu 2019 Di Kota Ambon".
- [33] Hilman Supriana dengan judul " pengaruh penggunaan media social terhadap pencegahan istilah money politics di kecamatan Astana Anyar Pemko Bandung".
- [34] I made Wicaksana dengan judul "Peran Bawaslu mengatasi kampanye politik uang di kota Denpasar Tahun 2014"